



Presbiterial Sinodal: Sebuah Kajian Manajemen Gereja terhadap Sistem Bergereja GPI Papua

*Cristophel van Harling

STT Gereja Protestan Indonesia (GPI) Papua

E-mail: vanharlingito657@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness of the Presbyterian-Synodal system of church governance in shaping an inclusive, participatory, and contextual ministry within the Indonesian Protestant Church in Papua (GPI Papua). Employing a qualitative approach and contextual case study, the research focuses on the relationship between church governance structures and Papuan communal culture, which emphasizes deliberation, egalitarianism, and communal living. The findings indicate that, in principle, the Presbyterian-Synodal system possesses the potential to accommodate the collective character of Papuan society and to support congregational participation in ecclesiastical decision-making processes. However, implementation at the local level faces several challenges, including inconsistent understanding of ecclesiastical roles and responsibilities, limited human resource capacity, and misalignment between synodal policies and the contextual needs of congregations. These issues reveal a gap between the theological-structural design of the system and the pastoral realities on the ground. Therefore, this study recommends institutional renewal based on local contexts, the development of transformative church leadership models, and the strengthening of ecclesiological education rooted in Papuan cultural and social dynamics. Theoretically and practically, this research contributes to the development of contextual ecclesiology and church management in multicultural settings, emphasizing the importance of synthesizing Reformed theology with local values. As such, this study not only offers a constructive critique of current church governance practices but also opens space for reflection and innovation, enabling the church to become more relevant, just, and empowering in addressing contemporary challenges and contextual realities.

Keywords: *Presbyterian-Synodal; GPI Papua; Church Management.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji efektivitas sistem pemerintahan Presbiterial Sinodal dalam membentuk pelayanan gereja yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual di lingkungan Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua), melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus kontekstual. Fokus utama diarahkan pada keterkaitan antara struktur pemerintahan gereja dan budaya masyarakat Papua yang mengedepankan nilai musyawarah, egalitarianisme, dan kehidupan komunal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prinsipil, sistem Presbiterial Sinodal memiliki potensi untuk mengakomodasi karakter kolektif masyarakat Papua dan mendukung partisipasi jemaat dalam pengambilan keputusan gerejawi. Namun, implementasi di tingkat lokal masih menemui berbagai hambatan, seperti

pemahaman yang belum seragam mengenai peran dan tanggung jawab jabatan gerejawi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketidaksesuaian antara kebijakan sinodal dan kebutuhan kontekstual jemaat. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara desain teologis-struktural sistem dengan realitas pastoral di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya pembaruan kelembagaan yang berbasis pada konteks lokal, pengembangan model kepemimpinan gereja yang transformatif, serta penguatan pendidikan eklesiologis yang berpijak pada budaya dan dinamika sosial masyarakat Papua. Secara teoretis dan praktis, penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan eklesiologi kontekstual dan manajemen gereja di wilayah multikultural, dengan menekankan pentingnya sintesis antara teologi Reformed dan nilai-nilai lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menawarkan kritik konstruktif terhadap praktik pemerintahan gereja yang ada, tetapi juga membuka ruang refleksi dan inovasi bagi gereja untuk menjadi lebih relevan, adil, dan memberdayakan dalam menjawab tantangan zaman dan konteksnya.

Kata-kata Kunci: Presbiterial Sinodal; GPI Papua; Manajemen Gereja.

PENDAHULUAN

Tulisan ini mengkaji sistem pemerintahan Presbiterial Sinodal dalam Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua). Sebagai hasil misi Zending Belanda, GPI Papua mewarisi aspek doktrinal, liturgis, serta struktur dan kepemimpinan gereja, termasuk sistem Presbiterial Sinodal. Kajian ini mengeksplorasi dimensi historis, teologis, dan manajerial dari sistem tersebut sebagaimana diterapkan dalam GPI Papua. Fokusnya adalah sejauh mana prinsip dasar Presbiterial Sinodal (seperti kesetaraan presbiter, otonomi jemaat terbatas, dan keputusan kolektif melalui sinode) diwujudkan dalam praksis kelembagaan saat ini.

Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua), sebelumnya GPI Irija, berasal dari misi Zending Belanda seperti NZG, UZV, Indische Kerk, serta kelompok lokal Sebijji Sesawi dan Ora Et Labora dari Ambon. Awalnya, pelayanan di Papua berada di bawah Gereja Protestan Maluku (GPM), yang membina jemaat di Merauke, Fakfak, Kaimana, dan Jayapura. Pada 16 November 1970, GPM menyatakan kesediaannya mengalihkan klasis-klasis di Irian Barat ke GKI melalui surat resmi kepada BPSU GKI, yang kemudian menjadi dasar kerja sama dan penataan wilayah pelayanan antara GPM dan GKI.¹

Integrasi antara GPM dan GKI Irian Barat mengalami diskontinuitas setelah Sidang Sinode GKI Irian Barat di Biak, November 1971, menetapkan klasis GKI Fakfak, yang dinilai GPM menyimpang dari kesepakatan awal. Sebagai respons, GPM melalui Rapat Kerja para ketua klasis di Irian Jaya merumuskan pembentukan gereja mandiri, yang

¹ Admin-Gereja, "Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI PAPUA)," *Kebaktian*, last modified 2022, <https://kebaktian.com/gereja-protestan-indonesia-di-papua-gpi-papua/>.

diformalkan dalam Sidang Proto Sinode Mei 1978. BPS GPM kemudian menetapkan wilayah pelayanannya di Irian Jaya sebagai Gereja Protestan Indonesia Irian Jaya (GPI Irja) pada 18 Februari 1981, dan diresmikan penuh pada 25 Mei 1985. Menyusul implementasi Otonomi Khusus Papua melalui UU No. 21 Tahun 2001, nama GPI Irja diubah menjadi GPI Papua dan disahkan secara resmi dalam Sidang Sinode ke-6 tahun 2003 di Fakfak.²

Sejarah panjang Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua), yang sebelumnya dikenal sebagai GPI Irian Jaya (GPI Irja), mencerminkan kompleksitas pelayanan Gereja di wilayah dengan keragaman budaya dan tantangan geografis yang unik. Perjalanan GPI Papua dari bagian internal Gereja Protestan Maluku (GPM) hingga menjadi Gereja mandiri pada tahun 1985 menunjukkan perlunya pendekatan manajemen Gereja yang adaptif dan kontekstual. Lolowang et al. menyatakan bahwa sistem manajemen Gereja yang kontekstual menjadi krusial untuk mengelola pelayanan dan kehidupan jemaat secara efektif, dengan mempertimbangkan realitas lokal yang ada.³ Sebagaimana diungkapkan oleh Ratupaira dan Sugiharto, manajemen Gereja yang baik dalam konsep governmentality memiliki prinsip-prinsip dalam Alkitab, yaitu pertumbuhan, perkembangan, disiplin, ketaatan, terealisasinya misi, kasih, sukacita, memberitakan Firman Tuhan yang benar, serta penggunaan media digitalisasi dengan tepat untuk mencapai sasaran sesuai maksud dan tujuan Allah.⁴

Sistem manajemen Gereja yang kontekstual memungkinkan lembaga Gereja termasuk GPI Papua untuk merespons kebutuhan khusus masyarakat yang dilayani, termasuk aspek budaya, sosial, dan ekonomi, sekaligus menghadapi tantangan internal maupun eksternal yang muncul dari kondisi setempat. Manajemen yang baik dalam Gereja tidak hanya berfokus pada teknik-teknik manajerial sekuler, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai spiritual yang mendasari pelayanan Gereja. Perlu adanya pendekatan kontekstual dalam manajemen Gereja, memungkinkan lembaga pengelolaan untuk beradaptasi dengan berbagai tantangan internal dan eksternal yang berbeda dalam setiap komunitas.⁵ Pengelolaan yang efektif harus mencakup dimensi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengendalian yang dirancang spesifik untuk konteks

² M.J. Felubun, *Sejarah Gereja Protestan Indonesia di Papua*, ed. Victor. N Jelira, Edisi 1. (Bogor: CV. Desindo Catur Pratama, 2007).

³ Cassandra Laurensia Lolowang, Beni Chandra Purba, dan Budi Kelana, "Dinamika Kepemimpinan Pastoral dalam Konteks Manajemen Gereja Modern," *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 4 (2023): 40–53, <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/juitak/article/view/190>.

⁴ Arnolis Ratupaira dan Ayub Sugiharto, "Manajemen Gereja dalam Konsep Governmentality dan Aplikasinya dalam Pelayanan Gereja Lokal," *Teokrasti: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 1 (2024): 65–81, <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jtk/article/view/868>.

⁵ Richard Reinhard Tanawany dan Marthince M. Kokmala, "Pentingnya Manajemen Gereja yang Baik dalam Meningkatkan Pelayanan di Jemaat GKI Efata Mariat Pantai," *Eirene* 7, no. 1 (2022): 484–501, https://ojs.ukip.ac.id/index.php/eirene_jit/article/view/32.

pelayanan Gereja tersebut. Pelayanan Gereja dapat terlaksana sepenuhnya melalui dukungan jemaat, dan perkembangan Gereja serta jemaatnya sangat tergantung pada kemampuan pimpinan Gereja dalam memobilisasi pelayanan dengan baik.⁶ Melalui inovasi dan strategi adaptasi yang baik, Gereja dapat mempertahankan relevansinya dan tetap efektif dalam menjalankan misi pelayanan, khususnya di era yang terus berubah ini.⁷ Dengan demikian, pemahaman dan penerapan sistem manajemen Gereja yang kontekstual menjadi kunci keberhasilan pelayanan yang berdampak positif bagi pertumbuhan rohani dan kesejahteraan komunitas jemaat di Papua maupun wilayah lain yang memiliki karakteristik yang serupa.

Sebagai institusi yang berakar pada misi teologis dan praksis pelayanan, Gereja dituntut untuk senantiasa menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan budaya umat yang dilayaninya. Dalam konteks ini, muncul kebutuhan akan sistem manajemen Gereja yang tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga peka terhadap konteks lokal.⁸ Refleksi mendalam terhadap fondasi historis dan teologis pemerintahan Gereja, sebagaimana dirumuskan dalam tradisi Reformasi, menyoroti prinsip kedaulatan Kristus, kepemimpinan kolektif, dan partisipasi jemaat. Prinsip-prinsip ini melahirkan model pemerintahan Presbiterial Sinodal yang mampu mengakomodasi dinamika lokal dalam bingkai kesetiaan pada ajaran iman.⁹

Sistem pemerintahan Gereja dalam tradisi Reformasi berkembang sebagai respons terhadap sentralisasi otoritas dalam Gereja Katolik Roma, khususnya dominasi Paus. Reformator seperti John Calvin menegaskan bahwa Kristus adalah satu-satunya kepala Gereja, dan setiap jemaat memiliki hak serta tanggung jawab aktif dalam kehidupan gereja. Prinsip ini menjadi landasan bagi model pemerintahan yang lebih demokratis dan partisipatif, yakni sistem Presbiterial Sinodal, yang memadukan unsur representatif dan kolektif dalam struktur gereja.¹⁰

⁶ Janes Sinaga et al., "Pemahaman Konsep Keterlibatan Anggota Jemaat dalam Pelayanan dan Penginjilan terhadap Pertumbuhan Gereja Berdasarkan Ayat Kisah Para Rasul 2:46-47," *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, no. 1 (2022): 46-47, <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/article/view/450>.

⁷ Joni Manumpak Parulian Gultom, "Kepemimpinan Gereja Lokal dalam Pengembangan Kepemimpinan Generasi 'Z' Pekerja Migran Kristen Indonesia di Malaysia," *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 1 (2022): 89-106, <https://e-journal.stakterunabhakti.ac.id/index.php/teruna/article/view/143>.

⁸ Maria Magdalena Manalu et al., "Manajemen Gereja: Upaya Meningkatkan Pelayanan Pastoral melalui Fungsi Manajemen Gereja yang Efektif," *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2023): 32-45, <https://stt-su.ac.id/e-journal/index.php/immanuel/article/view/175>.

⁹ Jairus Hasugian, S. Pantja Djati, dan Eddy Simanjuntak, "Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 1 (2022): 254-267, <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/694>.

¹⁰ Daud Darmadi dan Leonardo Paruntu, "Keseimbangan Otonomi Lokal dan Kesatuan Doktrinal: Kajian Pemerintahan Gereja dalam Konteks Masa Kini," *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 122-137, <https://journal-sttaw.ac.id/index.php/kaluteros/article/view/87>.

Sistem Presbiterial Sinodal muncul pasca-Reformasi melalui pemikiran Calvin. Istilah “Presbiterial” berasal dari bahasa Yunani *Presbyteros*, yang berarti tua-tua agama atau pemimpin rumah ibadah Yahudi. Calvin membedakan dua jenis *Presbyteros*: yang memimpin jemaat sekaligus menyampaikan Firman (gembala atau pendeta) dan yang memimpin tanpa mengajar Firman (penatua). Dalam tradisi Gereja kuno, istilah ini diterjemahkan sebagai “imam” yang memimpin ibadah, namun penggunaan kata “penatua” dalam konteks Protestan modern bertujuan mengembalikan makna aslinya sesuai tradisi Reformasi.¹¹ Sedangkan Sinodal dari kata *Synodos* (kata Yunani), berarti pertemuan dan perjalanan bersama, yang kemudian diadopsi dalam bahasa Latin *Synodus*, dan dalam bahasa Indonesia menggunakan istilah “Sinode”, yang berarti pertemuan atau perhimpunan resmi para wakil jemaat.¹² Dalam sistem ini, Gereja dipimpin oleh dewan penatua yang dipilih dari jemaat, dengan keputusan penting diambil melalui sidang sinode yang melibatkan perwakilan dari berbagai jemaat. Model ini dirancang untuk menghindari dominasi individu atau kelompok tertentu sekaligus mendorong partisipasi aktif seluruh jemaat. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Reformasi yang menekankan otonomi dan tanggung jawab kolektif dalam pengelolaan Gereja, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan dan keterlibatan jemaat dalam kehidupan gereja.¹³

Di Indonesia, sistem Presbiterial Sinodal mulai diterapkan oleh gereja-gereja hasil misi Belanda, terutama yang berafiliasi dengan tradisi Reformasi dan Calvinis. Beberapa denominasi, seperti GPM dan Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat (GPIB), mengadopsi sistem ini dan mengintegrasikannya dalam mekanisme sinode mereka. Melalui sidang sinode yang kolektif, kebijakan dan keputusan strategis ditetapkan bersama, mencerminkan semangat konsultatif dan representatif yang menjadi ciri khas sistem Presbiterial Sinodal.¹⁴ Dalam hal ini, GPI Papua sebagai Gereja yang tumbuh dalam tradisi yang diwarisi oleh Gereja Induk (GPM dan Indische Kerk) maka GPI Papua juga beraliran Calvinis (termasuk mewarisi sistem Presbiterian Sinodal).¹⁵

Penelitian ini berbeda dari penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada aspek teologis dan struktural sistem pemerintahan Presbiterial Sinodal, tanpa mengaitkannya

¹¹ Christiaan de Jonge, *Apa itu CALVINISME?*, ed. Rika Uli Napitulu dan Simarankir, Edisi 6. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008).

¹² Junaidah, *Partisipasi Organisasi Keagamaan dalam Penanggulangan Hiv*, Cet. 1. (Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2021).

¹³ Johannes Augustinus, Beni Chandra Purba, dan Budi Kelana, “Efektivitas Manajemen Kepemimpinan dalam Gereja,” *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 4 (2023): 27–39, <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/juitak/article/view/188/108>.

¹⁴ Felubun, *Sejarah Gereja Protestan Indonesia di Papua*.

¹⁵ *Ibid.*

secara eksplisit dengan dinamika implementasi dalam konteks geografis dan sosiokultural tertentu. Misalnya, dokumen resmi GPIB (2016) menegaskan prinsip dasar Presbiterial Sinodal sebagai pemerintahan Gereja berbasis kepemimpinan kolektif dan sinodalitas, namun tidak mengkaji pelaksanaannya secara kritis dalam konteks spesifik. Begitu pula penelitian oleh Hasugian et al., yang lebih menekankan pengaruh pemahaman rohaniwan terhadap pemerintahan Gereja untuk menciptakan ketertiban dalam jemaat, namun belum menyentuh aspek pengelolaan organisasi Gereja dalam kerangka sistem ini.¹⁶ Penelitian lain seperti yang dilakukan oleh Darmadi dan Paruntu serta Johannes Augustinus et al. memberikan kontribusi penting dalam menguraikan prinsip otonomi lokal dan efektivitas kepemimpinan Gerejawi, tetapi tidak mengupas bagaimana sistem Presbiterial Sinodal dijalankan secara konkret dalam satu Gereja tertentu yang berhadapan dengan realitas sosiogeografis khas.^{17,18}

Penelitian ini mengintegrasikan pendekatan historis, teologis, dan manajerial untuk menganalisis implementasi sistem Presbiterial Sinodal dalam GPI Papua, mengkaji kesesuaian doktrinal sekaligus tantangan praktis dalam konteks sosial-budaya Papua. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi signifikan pada eklesiologi kontekstual dan manajemen Gereja melalui evaluasi tata kelola yang efektif dan relevan secara praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus kontekstual. Kualitatif dengan metode studi kasus kontekstual adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena atau kejadian secara mendalam dalam konteks atau situasi nyata tempat fenomena tersebut terjadi.¹⁹ Metode ini digunakan untuk menganalisis penerapan sistem Presbiterial Sinodal dalam Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua). Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap kompleksitas interaksi sosial dan budaya lokal yang memengaruhi tata kelola gereja secara autentik dan kontekstual.

Data didapat dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya untuk keperluan penelitian tertentu.

¹⁶ Hasugian, S. Pantja Djati, dan Eddy Simanjuntak, "Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja."

¹⁷ Darmadi dan Leonardo Paruntu, "Keseimbangan Otonomi Lokal dan Kesatuan Doktrinal: Kajian Pemerintahan Gereja dalam Konteks Masa Kini."

¹⁸ Augustinus, Beni Chandra Purba, dan Budi Kelana, "Efektivitas Manajemen Kepemimpinan dalam Gereja."

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Bandung: CV. Alfabeta, 2018).

Data ini belum pernah diolah atau dianalisis sebelumnya dan biasanya dikumpulkan melalui berbagai cara. Data sekunder adalah data yang sudah dikumpulkan dan diolah sebelumnya oleh pihak lain, bukan langsung oleh peneliti untuk tujuan penelitian saat ini. Data ini biasanya sudah tersedia dan dapat diakses dari berbagai sumber.²⁰ Data primer dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur dengan penatua, pendeta, anggota Majelis Sinode dan Klasis, serta pemimpin jemaat sentral. Instrumen wawancara menggali persepsi dan pengalaman terkait kolegialitas, representasi, musyawarah sinodal, dan integrasi nilai budaya Papua dalam tata kelola gereja. Data sekunder diperoleh dari dokumen resmi seperti Tata Gereja GPI Papua edisi 2022 untuk mengidentifikasi perubahan pasal dan landasan teologis.

Analisis data menggunakan pendekatan tematik, dimulai dengan transkripsi wawancara, pengkodean, dan pengelompokan berdasarkan tema utama seperti kolegialitas, representasi jemaat, proses musyawarah, dan pengaruh budaya lokal terhadap struktur kelembagaan. Validitas temuan diperkuat dengan triangulasi antara wawancara dan dokumen resmi.²¹

Hasil penelitian menyajikan gambaran holistik penerapan sistem Presbiterial Sinodal di GPI Papua yang unik dan dinamis. Sistem ini mengakomodasi prinsip teologis universal sekaligus beradaptasi dengan kekhasan budaya Papua, memperkuat legitimasi dan efektivitas tata kelola gereja. Namun, terdapat tantangan seperti resistensi budaya dan komunikasi antar lembaga yang menjadi bahan refleksi pengembangan sistem pemerintahan gereja ke depan. Studi ini berkontribusi pada tata kelola gereja yang inklusif, adaptif, dan responsif terhadap konteks budaya lokal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Manajemen Gereja

Manajemen, menurut George Terry, terdiri dari empat elemen utama: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan. Perencanaan mencakup penetapan visi, misi, tujuan, serta identifikasi sumber daya. Pengorganisasian menyusun struktur dan pembagian tugas secara efisien. Penggerakan mendorong motivasi, komunikasi, dan partisipasi anggota organisasi. Sementara itu, pengawasan memastikan semua kegiatan

²⁰ Gagah Daruhadi dan Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–5443, <https://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/5181>.

²¹ Sumanto, *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006).

berjalan sesuai rencana dan mencapai hasil yang diinginkan.²² Dalam hal ini, penerapan keempat fungsi ini maka manajemen akan berfungsi dengan baik dalam berbagai konteks, termasuk dalam lingkup bergereja.

Manajemen Gereja menempatkan pengorganisasian, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas sebagai elemen inti yang saling mendukung dalam menjalankan fungsi kelembagaan. Pengorganisasian berperan strategis dalam mengelola sumber daya manusia dan material secara efektif, melalui pembagian tugas yang terstruktur, penataan hierarki organisasi, serta penetapan peran dan tanggung jawab yang selaras dengan arah pelayanan dan nilai-nilai Gereja.²³ Struktur pelayanan yang teratur mencerminkan tubuh Kristus, di mana setiap anggota menjalankan perannya sesuai karunia yang diterima (1 Korintus 12:12-27). Dengan organisasi yang fleksibel namun terarah, pelayanan menjadi lebih selaras, efisien, dan bebas dari tumpang tindih peran. Pendekatan berbasis karunia rohani menjadi landasan utama pembagian tugas yang efektif.

Kepemimpinan merupakan elemen kunci dalam dinamika manajemen gereja. Kepemimpinan yang efektif tidak hanya mencakup aspek administratif, tetapi juga berperan sebagai pembimbing pastoral dan pendidik rohani. Peran ini sangat penting dalam membina pertumbuhan iman jemaat serta memastikan pelayanan gereja tetap sejalan dengan visi dan misinya. Kepemimpinan Gereja perlu disesuaikan dengan karakter jemaat dan budaya lokal agar tercipta iklim yang inklusif dan partisipatif, mengintegrasikan otoritas rohani dengan manajemen yang fleksibel dan adaptif.²⁴ Pemimpin Gereja idealnya menjadi teladan dalam karakter, pengajaran, dan pelayanan, meniru Kristus yang memimpin melalui pelayanan (Markus 10:45). Model *servant leadership* Robert Greenleaf menjadi landasan utama, dengan menempatkan kebutuhan jemaat dan misi Allah sebagai fokus utama.²⁵

²² Neri Wijayanti dan Febrian Arif Wicaksana, "Implementasi Fungsi Manajemen George R. Terry dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan," *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3, no. 1 (2023): 30–43, <https://jurnalcerdik.ub.ac.id/index.php/jurnalcerdik/article/view/199>.

²³ Yusuf Slamet Handoko dan Alon Mandimpu Nainggolan, "Peran Fungsi Pengorganisasian dalam Peningkatan Kinerja Staf Gereja di GPdI Mahanaim Tegal (Sebuah Kajian Teologis)," *DA AT Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2021): 1–13, https://www.researchgate.net/publication/370988104_PERAN_FUNGSI_PENGORGANISASIAN_DALAM_PENINGKATAN_KINERJA_STAF_GEREJA_DI_GPdI_MAHANAIM_TEGAL_Sebuah_Kajian_Teologi.

²⁴ Rogate Artaida Tiarasi Gultom et al., "Analisis Kepemimpinan dalam Gereja: Studi Perbandingan Kepemimpinan Gereja Protestan dan Gereja Pentakostal," *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (2023): 955–963, <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/1095>.

²⁵ Gabriella Kirana Mutiara Purba, Gunawan Yuli Agung Suprabowo, dan Irene Ludji, "Kajian Etis-Teologis terhadap Peran Pendeta dalam Pengambilan Keputusan di GKJ Salatiga Selatan," *Fidei: Jurnal Teologi Sistemika dan Praktika* 5, no. 2 (2022): 212–232, <https://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/366>.

Proses pengambilan keputusan dalam Gereja berbeda dari institusi sekuler karena melibatkan aspek teologis dan spiritual secara mendalam. Keputusan tidak hanya didasarkan pada logika atau efisiensi, tetapi juga pencarian kehendak Allah melalui doa, refleksi firman, dan musyawarah bersama. Contohnya, Konsili Yerusalem (Kisah Para Rasul 15) menunjukkan bahwa pengambilan keputusan gerejawi melibatkan diskusi terbuka, pertimbangan alkitabiah, dan kesepakatan kolektif.²⁶

Akuntabilitas dalam manajemen Gereja merupakan indikator penting dari integritas dan transparansi lembaga Gereja dalam menjalankan fungsinya. Tanawany dan Kokmala menekankan bahwa akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan keuangan, tetapi mencakup seluruh aspek pelayanan, termasuk pengelolaan sumber daya, kejelasan program kerja, serta pertanggungjawaban moral para pemimpin rohani. Akuntabilitas yang baik akan membentuk budaya pelayanan yang profesional dan dapat dipercaya, serta mencegah penyalahgunaan kuasa atau dana Gereja.²⁷ Yogatama et al. menambahkan bahwa sistem audit internal, pelaporan periodik, serta keterlibatan jemaat dalam evaluasi pelayanan dapat menjadi mekanisme penguatan akuntabilitas.²⁸

Integrasi pengorganisasian, kepemimpinan, pengambilan keputusan, dan akuntabilitas dalam manajemen Gereja sangat penting untuk menciptakan komunitas iman yang sehat dan responsif. Dengan prinsip-prinsip tersebut, Gereja mampu mengembangkan pelayanan efektif, memberdayakan jemaat, dan menjawab panggilan misi. Di tengah pluralitas dan kompleksitas Indonesia, manajemen Gereja yang kontekstual, spiritual, dan profesional menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga keberlanjutan dan relevansi pelayanan.²⁹

Model Prebiterial Sinodal

Model Presbiterial Sinodal merupakan sistem pemerintahan Gereja yang menggabungkan prinsip-prinsip presbiterial (kepemimpinan oleh para penatua) dan sinodal (pengambilan keputusan melalui musyawarah bersama). Sistem ini menekankan pada kolegialitas, representasi, dan musyawarah sinodal sebagai dasar dalam pengambilan

²⁶ Ibid.

²⁷ Tanawany dan Marthince M. Kokmala, "Pentingnya Manajemen Gereja yang Baik dalam Meningkatkan Pelayanan di Jemaat GKI Efata Mariat Pantai."

²⁸ Kelvin Imanuela Cristian Yogatama, Helmi Herawati, dan Pedi Riswandi, "Analisis Akuntabilitas, Efektifitas dan Transparansi Laporan Keuangan Gereja terhadap Pengelolaan Penggunaan Dana Sosial di GBI Sinar Kasih Kabupaten Bengkulu Tengah," *JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi* 4, no. 4 (2024): 178–188, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/597>.

²⁹ Adolina Jaquelina Diana Watofa, Roberth Ruland Marini, dan D.S. Budiono Santoso, "Analisis Teologis Implementasi Manajemen dalam Gereja," *Sesawi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2023): 200–215, <https://e-journal.sttsabdaagung.ac.id/index.php/sesawi/article/view/224>.

keputusan Gerejawi. Dalam hal ini, kolegialitas merujuk pada kerja sama antar pemimpin Gereja, representasi mencerminkan keterlibatan umat dalam proses pengambilan keputusan, dan musyawarah sinodal menekankan pentingnya diskusi bersama dalam menentukan arah Gereja.³⁰

Secara fungsional, Presbiterial berarti bahwa para penatua (*presbyteroi*) berfungsi sebagai pemimpin rohani yang mewakili jemaat, bukan sebagai penguasa tunggal.³¹ Sinode, sebagai ruang perjumpaan seluruh elemen Gereja, merepresentasikan suatu komunitas yang berjalan bersama (*syn-hodos*), di mana musyawarah bukan hanya prosedural tetapi juga spiritual. Ini mencerminkan semangat mendalam untuk mendengar dan berbicara dalam terang firman Allah dan kehendak Roh Kudus.³² Dalam kerangka ini, seluruh pengambilan keputusan strategis maupun liturgis dilakukan secara kolektif. Representasi umat tidak hanya bersifat simbolik, melainkan nyata dalam proses-proses deliberatif yang melibatkan sinode sebagai forum utama.

Sistem Presbiterian Sinodal berbeda dengan model Episkopal dan Kongregasional dalam pemerintahan Gereja. Model Episkopal, dari kata Yunani *Episkopos* yang berarti penilik atau uskup, menempatkan otoritas tertinggi pada seorang uskup yang memiliki wewenang hierarkis atas jemaat. Keputusan penting diambil oleh pimpinan pusat dan diteruskan ke bawah untuk dilaksanakan, menciptakan budaya organisasi *top-down*. Model ini umum dalam Gereja Katolik, Ortodoks, dan beberapa denominasi Anglikan.³³ Sebaliknya, Kongregasional adalah sistem pemerintahan Gereja di mana otoritas tertinggi ada pada jemaat lokal. Istilah ini berasal dari kata Latin *congregatio*, yang berarti perhimpunan. Sistem ini menekankan prinsip demokrasi Gerejawi, di mana seluruh anggota jemaat memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan penting, mencerminkan konsep imamat semua orang percaya yang menegaskan peran aktif setiap anggota dalam kehidupan Gereja.³⁴

³⁰ Hasugian, S. Pantja Djati, dan Eddy Simanjuntak, "Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja."

³¹ Sri Wahyuni, "Analisis tentang Peran Penatua dalam Pertumbuhan Gereja," *Kharismata: Jurnal Teologi Pantekosta* 3, no. 1 (2020): 46–59, <https://e-journal.stajember.ac.id/index.php/kharismata/article/view/38>.

³² Christian Wibi dan Nora Dolisna Simanjuntak, "Gereja Diaspora: Model Gerakan Sinodal bagi Gereja Katolik Indonesia pada Masa Kini," *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya* 7, no. 1 (2024): 1–17, <https://e-journalstpbonaventura.ac.id/index.php/JURKAPS/article/view/88>.

³³ Hendriko Siagian dan Pardomuan Munthe, "Pengaruh Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja terhadap Episkopal Sinodal Gereja HKI," *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Teologi* 1, no. 2 (2021): 65–73.

³⁴ Ersada Siregar dan Yanto Paulus Hermanto, "Sistem Pemerintahan Gereja yang dapat Menjaga Kepemimpinan Alkitabiah," *Edulead: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 2 (2023): 117–130, <https://stak-pesat.ac.id/e-journal/index.php/edulead/article/view/167>.

Model presbiterial sinodal menggabungkan elemen Episkopal dan Kongregasional dengan kepemimpinan majelis yang terdiri dari penatua dan pendeta pilihan jemaat. Keputusan penting diambil melalui sinode yang melibatkan perwakilan berbagai jemaat, mencerminkan prinsip kolegialitas dan representasi. Meskipun ada struktur yang menghubungkan jemaat, setiap jemaat tetap memiliki otonomi dalam pelayanannya.³⁵ Selain itu, model presbiterial sinodal juga dapat mengalami pergeseran menuju struktur yang lebih hierarkis, terutama jika tidak ada pemahaman yang mendalam tentang prinsip kolegialitas dan representasi. Hal ini dapat mengarah pada dominasi oleh kelompok tertentu dalam pengambilan keputusan, yang bertentangan dengan semangat sinodalitas.³⁶

Sistem Presbiterial Sinodal bukan sekadar struktur administratif, melainkan didasarkan pada keyakinan teologis bahwa Gereja adalah persekutuan orang percaya (*communio sanctorum*) dengan Kristus sebagai pusat pelayanan (*Kristosentris*), sesuai prinsip *Solus Christus*. Otoritas Gereja tidak diberikan pada individu, melainkan pada kolegium presbiter yang dipilih dari umat sebagai wakil yang bertanggung jawab di hadapan Allah dan jemaat. Dalam tata Gereja reformasi Calvin di Jenewa, terdapat empat jabatan: gembala (pendeta) yang memberitakan Firman dan melayani sakramen, pengajar yang menyebarkan iman, penatua yang bersama pendeta mengawasi jemaat, dan diaken yang melayani kaum miskin dan sakit. Struktur ini didasarkan pada Efesus 4:11 untuk jabatan gembala dan pengajar, serta Roma 12 dan 1 Korintus 12 untuk penatua dan diaken. Calvin menegaskan bahwa jabatan *Episkopos* (uskup) dan *Presbyteros* (penatua/pendeta) memiliki fungsi yang sama, yakni mengawasi dan memimpin gereja berdasarkan Firman Allah (Titus 1:5,7), sehingga perbedaan jabatan bukanlah hirarki kekuasaan seperti dalam Gereja Katolik Roma, melainkan pembagian tugas dan peran tanpa tingkatan pangkat. Pemilihan jabatan didasarkan pada kemampuan, perilaku, dan kehidupan rohani yang sesuai, bukan sekadar demokrasi, melainkan sebagai panggilan dan tanggung jawab kepada Allah, Kristus, dan majelis gereja.³⁷

Berdasarkan ajaran Calvin bahwa episkopos, presbyteros, dan pendeta memiliki fungsi setara dalam memimpin jemaat, sistem Presbiterial Sinodal dengan kepemimpinan kolegial dan non-hierarkis sangat sesuai diterapkan di Papua. Masyarakat Papua yang

³⁵ Tesalonika Bella Piri, Agnes Relly Poluan, dan Johanna P. Zetlight, "Jabatan Gerejawi dalam Sistem Presbiterial Sinodal di GMIM," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 15–20, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2716>.

³⁶ Prins Theodor Mailoa, "Kajian Sosiologi Agama terhadap Fenomena Hierarki Jabatan Fungsional Gerejawi Sistem Presbiterial Sinodal dalam Konteks Gereja Masehi Injili di Halmahera bagian Halmahera Utara" (Universitas Kristen Satya Wacana, 2020).

³⁷ Jonge, *Apa itu CALVINISME?*

egaliter mengutamakan musyawarah bersama tetua adat dalam pengambilan keputusan, dengan pemimpin berperan sebagai fasilitator yang menjaga harmoni dan solidaritas komunitas. Sistem ini selaras dengan budaya lokal dan mampu memperkuat pelayanan gereja secara kontekstual.³⁸ Sejalan dengan penelitian Heryanto, kepemimpinan yang adaptif terhadap konteks lokal dan responsif terhadap kebutuhan umat akan lebih efektif mendorong pertumbuhan gereja. Prinsip *Ecclesia Semper Reformanda* menuntut evaluasi terus-menerus terhadap struktur, spiritualitas, dan arah pelayanan. Oleh karena itu, penerapan sistem Presbiterial Sinodal di Papua tidak hanya mencerminkan kesetiaan pada prinsip teologis Reformasi, tetapi juga kepekaan budaya lokal. Dengan model kepemimpinan kolegial dan partisipatif, gereja dapat lebih efektif melayani dan membina jemaat sesuai nilai-nilai masyarakat Papua.³⁹

Sejarah dan Struktur GPI Papua

Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) tumbuh dari karya misi yang dilakukan oleh beberapa badan zending Belanda seperti Nederlandsche Zendeling Genootschap (NZG), Utrechtse Zendingsvereniging (UZV), dan Indische Kerk, dengan dukungan organisasi lokal dari Maluku seperti Sebiji Sesawi dan Ora Et Labora. Pada awalnya, pelayanan ini berada di bawah naungan Gereja Protestan Maluku (GPM), namun dinamika gerejawi dan kebutuhan akan otonomi memunculkan gereja mandiri yang resmi berdiri pada tahun 1985 dengan nama GPI Irian Jaya. Nama ini berubah menjadi GPI Papua pada tahun 2003 sejalan dengan pemberlakuan Otonomi Khusus Papua. Struktur organisasi GPI Papua terdiri atas Jemaat, Klasis, dan Sinode, yang berfungsi secara terpadu dan kolektif berdasarkan Peraturan Pokok gereja, sehingga otoritas gereja dijalankan bersama-sama melalui musyawarah dan pemilihan, bukan oleh individu tunggal.

Pada sistem presbiterial-sinodal yang dianut GPI Papua, peran presbiter sangat strategis sebagai penghubung antara jemaat dan Sinode. Presbiter tidak hanya berfungsi sebagai pelayan lokal, tetapi juga aktif dalam pengambilan keputusan di berbagai forum seperti Rapat Majelis Jemaat, Majelis Pekerja Klasis, dan Sidang Sinode. Melalui peran ini, presbiter menyuarkan aspirasi jemaat, merumuskan kebijakan pelayanan secara kolektif, dan mengimplementasikan keputusan Sinode di tingkat jemaat. Dengan demikian, presbiter

³⁸ Obeth Kaigere, Antik Tri Susanti, dan Elly Esra Kudubun, "Peran Komunikasi Rasional dalam Keberhasilan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua," *JEHSS: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 403–413, <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1229>.

³⁹ Heryanto, "Peran Pemimpin Gereja dalam Kepemimpinan Pelayanan Kaum Muda Masa Kini," *Harvester: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 5, no. 1 (2020): 59–72, <https://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/view/21>.

menjadi jembatan penting yang menyatukan visi teologis gereja dengan praktik pelayanan yang kontekstual dan relevan di tengah keberagaman dan dinamika masyarakat Papua.⁴⁰

Manajerial Sistem Presbiterial Sinodal dalam GPI Papua

Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) berkembang dari misi badan zending Belanda dan dukungan organisasi lokal Maluku, awalnya berada di bawah Gereja Protestan Maluku (GPM). Karena kebutuhan otonomi, GPI Irian Jaya berdiri mandiri pada 1985 dan berganti nama menjadi GPI Papua pada 2003 seiring Otonomi Khusus Papua. Struktur organisasi GPI Papua terdiri dari Jemaat, Klasis, dan Sinode yang bekerja kolektif berdasarkan Peraturan Pokok gereja, menjalankan otoritas melalui musyawarah. Dalam sistem presbiterial-sinodal, presbiter berperan strategis sebagai penghubung jemaat dan Sinode, aktif dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan, menjembatani visi teologis dengan pelayanan kontekstual di Papua.

Perencanaan pelayanan secara sinodal, dilakukan melalui rancangan program dan anggaran melalui Rapat Kerja Sinode, Rapat Pimpinan Sinode (MPS dan MPK) yang di lakukan setiap 1 tahun sekali dan akan dievaluasi setiap 3 bulan yg di sebut rapat triwulan, yang kemudian dibahas bersama dalam Sidang Sinode.⁴¹ Forum Sinodal adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan dalam menjawab masalah-masalah pelayanan dalam tingkat menengah-kebawah (Klasis-Jemaat). Dalam hal ini setiap perwakilan dari masing-masing struktur organisasi gereja, turut bergabung dalam pengambilan keputusan yang dilakukan secara musyawarah tanpa adanya kepentingan individu, sesuai dengan definisi kata sinodal, yang kemudian dilaksanakan dalam lingkup struktur organisasi-jemaat dan dilakukan evaluasi berkala.⁴² Struktur atau pembagian tugasnya meliputi 1 garis komando yakni ketua sampai dengan bidang-bidang pelayan, Garis pengawasan antra ketua dan wakil-wakil ketua kepada bidang-bidang pelayanan, dan mempunyai garis pertanggung jawaban dari bidang-bidang pelayanan kepada Ketua dan Wakil-wakil Ketua Sinode.⁴³

Pelaksanaan pelayanan GPI Papua dijalankan melalui berbagai bidang seperti PELKAT, IAI, EKUBANG, ADHUMHAM, dan KOMINFO, yang masing-masing mengikuti arah strategis dalam dokumen PIP dan RIP. Program dilaksanakan secara koordinatif dari sinode hingga jemaat untuk memastikan pelayanan bersifat dialogis, bukan top-down. Evaluasi dan akuntabilitas dilakukan rutin melalui forum seperti Rapat Triwulan, Rapat Kerja Tahunan, dan Sidang Sinode, dengan laporan terbuka dari setiap unit pelayanan yang ditelaah oleh Badan Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan.

⁴⁰ GPI Papua, *Amandemen Tata Gereja GPI Papua* (Merauke: Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, 2022).

⁴¹ R.N., "Wawancara dengan Pegawai Sinode, 26 Mei" (Papua, 2025).

⁴² A.R., "Wawancara dengan Pdt. GPI Papua, 25 Mei" (Papua, 2025).

⁴³ R.N., "Wawancara dengan Pegawai Sinode, 26 Mei."

Perencanaan pelayanan secara sinodal, dilakukan melalui rancangan program dan anggaran melalui Rapat Kerja Sinode, Rapat Pimpinan Sinode (MPS dan MPK) yang di lakukan setiap 1 tahun sekali dan akan dievaluasi setiap 3 bulan yg di sebut rapat triwulan, yang kemudian dibahas bersama dalam Sidang Sinode.⁴⁴

Sistem ini menyeimbangkan dimensi spiritual dan administratif dalam kepemimpinan gereja dengan menekankan transparansi, akuntabilitas, dan kolegialitas dalam perencanaan hingga evaluasi pelayanan secara sinodal. Sidang Sinode sebagai forum tertinggi menetapkan arah strategis lima tahunan melalui musyawarah bersama, tanpa dominasi individu. Model manajerial GPI Papua yang kolektif, kontekstual, dan berbasis musyawarah mencerminkan nilai kebersamaan budaya lokal serta menerapkan desentralisasi terkendali dengan distribusi kewenangan yang merata. Prinsip kesetaraan memungkinkan semua pelayan menyampaikan suara dan evaluasi secara setara. Namun, pelaksanaan keputusan sinodal di tingkat jemaat masih menghadapi tantangan, terutama keterbatasan sumber daya manusia dalam memahami dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Berdasarkan data statistik GPI Papua, sebagian besar lingkup pelayanan GPI Papua lebih banyak terdiri dari jemaat di kampung dan daerah pedalaman Papua, yang mayoritas pekerjaan sebagai petani dan nelayan. Dalam hal ini, secara tidak langsung sebagian dari mereka tentunya belum memiliki pemahaman yang signifikan mengenai manajerial sistem presbiter sinodal yang benar. Ini akan sangat berpengaruh pada tingkat berjemaat, terkhususnya pada pemenuhan kriteria jemaat. Berkaitan mengenai kurangnya SDM yang memadai, pemenuhan kriteria jemaat seperti pemilihan perangkat pelayan dan kemampuan dana yang cukup, sering bertentangan dengan kondisi jemaat lokal. Namun demi memenuhi kriteria tadi terkadang aspek-aspek lokal sering dinomorduakan, sehingga dalam penerepannya banyak perangkat pelayan yang kurang paham dan sering miss dengan fungsi yang sebenarnya, tetapi juga dalam kewajiban pemberian persembahan tidak memenuhi target.⁴⁵

Hal ini kemudian sejalan dengan penelitian Ngabalin et al. bahwa mata pencaharian orang Papua secara khusus sebagai seorang Petani, selain bekerja sebagai peramu, berburu, petani, dan nelayan, dalam mencukupi hidup baik secara individu ataupun kelompok.⁴⁶ Bahwasanya penerapan mengenai keputusan sinode dalam lingkup jemaat kurang berjalan dengan baik, karena keputusan sinodal yang bersifat normatif dan mengikat sehingga kurang memperhatikan kondisi lokal jemaat pelayanannya. Hal lain yang sama dengan ini juga

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ A.R., "Wawancara dengan Pdt. GPI Papua, 25 Mei."

⁴⁶ Marthinus Ngabalin, Suwanto Adi, dan Tony Tampake, "Pemalangan Tanah Sebagai Bentuk Resistensi Masyarakat Papua Barat terhadap Pembangunan," *Indonesian Journal of Religion and Society* 6, no. 2 (2024): 66–77, <https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/423>.

adalah adanya kesenjangan antara presbiter dalam jemaat, ini juga merupakan tantangan yang sering ditemui dalam lingkup berjemaat.

Pendeta dianggap sebagai jabatan tertinggi dalam jemaat, disusul oleh penatua, dan terendah adalah diaken. Dalam konteks pelayanan jemaat, jabatan diaken sering dianggap jabatan paling bawah jika dibandingkan dengan penatua. Sehingga dalam praktiknya mulai memunculkan rasa cemburu terhadap tugas pelayanan dalam gereja. Terkadang, diaken merasa iri dengan tugas penatua yang bisa memberitakan firman di mimbar, dan hal-hal lain yang mencakup menjaga ketertiban dalam jemaat. Kasus lain dijumpai dalam penjabatan selama 2 periode. Keinginan untuk naik ke tahap penatua karena dianggap lebih tinggi dari jabatan diaken.⁴⁷ Tetapi yang paling kompleks adalah keterbatasan pengetahuan mengenai definisi sistem presbiter sinodal itu sendiri dalam gereja. Banyak yang hanya sekedar tahu GPI Papua sebagai gereja warisan dari GPM, termasuk mewarisi sistem presbiterial sinodal. Tapi dalam penerapan sistem itu terkadang masih bertentangan dengan definisi yang asli.⁴⁸

Sistem Presbiterial Sinodal seharusnya tidak hanya dipahami sebagai bentuk pelayanan gereja, tetapi juga sebagai standar ideal bagi kehidupan jemaat. Namun, dalam praktiknya, penerapan sistem ini di GPI Papua masih belum sepenuhnya mencerminkan esensinya, meskipun telah menjadi dasar dalam rumusan Tata Dasar Gereja. Berdasarkan realitas tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan sistem Presbiterial Sinodal dalam struktur dan praksis pelayanan GPI Papua, dengan meninjau aspek manajerial, teologis, dan historis. Penelitian ini juga mengevaluasi sejauh mana sistem ini mampu mewujudkan kepemimpinan gereja yang inklusif, partisipatif, dan kontekstual, yang selaras dengan nilai-nilai budaya lokal Papua yang egaliter dan kolektif. Selain itu, penelitian ini mengidentifikasi berbagai hambatan implementasi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemahaman eklesiologis yang belum merata, serta tantangan sosial ekonomi jemaat di wilayah pedalaman. Hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi nyata bagi pengembangan tata kelola gereja yang kontekstual, reformis, dan adaptif terhadap dinamika masyarakat Papua masa kini.

KESIMPULAN

Sistem pemerintahan Presbiterial Sinodal yang diimplementasikan dalam Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI Papua) merepresentasikan suatu paradigma eklesiologis yang berakar kuat pada prinsip kesetaraan pelayanan (*presbiter*), deliberasi kolektif dalam sidang-sidang sinodal, serta representasi jemaat secara struktural dan partisipatif. Model ini

⁴⁷ L.T., "Wawancara dengan Penatua Jemaat, 26 Mei" (Papua, 2025).

⁴⁸ M.M., "Wawancara dengan Diaken Jemaat, 26 Mei" (Papua, 2025).

secara teoretis merespons kebutuhan reformasi tata kelola gereja dengan mengintegrasikan prinsip demokrasi gerejawi dan kearifan lokal Papua yang menekankan musyawarah, solidaritas komunitas, serta nilai egalitarian. Namun, hasil empiris menunjukkan adanya gap yang signifikan antara ideal normatif dan praktik kelembagaan, terutama terkait pemahaman dan pelaksanaan peran diaken, penatua, dan pendeta. Ketimpangan fungsi dan dominasi peran tertentu mengindikasikan bahwa internalisasi paradigma kepemimpinan kolegal belum optimal, yang berimplikasi pada fragmentasi proses pengambilan keputusan dan marginalisasi partisipasi jemaat. Fenomena ini menandakan perlunya refleksi kritis terhadap struktur birokrasi gerejawi yang masih memosisikan sebagian pelayan dalam relasi hierarkis meskipun sistemnya mengklaim inklusivitas dan kesetaraan. Dengan demikian, penguatan pemahaman eklesiologis dan pendidikan teologis yang mendalam mutlak diperlukan agar prinsip-prinsip sinodalitas dapat benar-benar teraktualisasi dalam kerangka pelayanan yang responsif dan demokratis.

Secara struktural, sistem sinodal menyediakan ruang institusional berupa forum Sidang Sinode, Rapat Kerja, dan evaluasi berkala yang secara teori memungkinkan keterlibatan lintas strata gereja. Namun, efektivitas partisipasi masih terhambat oleh disparitas kapasitas sumber daya manusia, khususnya di daerah pedalaman yang menghadapi keterbatasan literasi teologis dan administrasi. Akibatnya, partisipasi cenderung bersifat ritualistik dan formalistik tanpa menyentuh esensi substantif pengambilan keputusan strategis. Selain itu, ketidakselarasan antara kebijakan sinodal yang normatif dengan kondisi sosio-ekonomi jemaat, yang mayoritas petani dan nelayan, menimbulkan disonansi implementatif, misalnya dalam aspek kewajiban keuangan dan pembagian tugas pelayanan. Oleh karena itu, transformasi sistematis diperlukan melalui peningkatan kapasitas kepemimpinan lokal, formulasi kebijakan sinodal yang kontekstual dan adaptif, serta revitalisasi spiritualitas pelayanan yang menempatkan kesejahteraan umat sebagai pusat misi gereja. Pendekatan ini sejalan dengan paradigma *Ecclesia semper reformanda*, yakni gereja yang senantiasa mereformasi diri secara dinamis dalam dialog konstruktif antara Firman Tuhan dan realitas historis komunitas yang dilayani. GPI Papua dengan demikian diharapkan mampu menginternalisasi dan mengaktualisasikan visi gereja yang demokratis, inklusif, dan kontekstual secara berkelanjutan.

KONTRIBUSI PENELITIAN

Artikel ini menghadirkan kontribusi substansial melalui pendekatan yang mengintegrasikan analisis teologis, historis, dan manajerial secara kontekstual. Penelitian ini

memperkaya kajian eklesiologi kontekstual dengan mengkaji secara mendalam penerapan sistem Presbiterial Sinodal di Papua, sebuah wilayah multikultural yang kompleks. Di samping memperkuat landasan teoretis, artikel ini juga menawarkan kontribusi aplikatif berupa pengembangan model manajemen gereja yang inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap dinamika sosial-budaya lokal, terutama dalam konteks gereja-gereja yang berakar pada tradisi Reformasi.

REKOMENDASI PENELITIAN LANJUTAN

Penelitian ini membuka peluang bagi kajian lanjutan yang lebih mendalam dan menyeluruh terkait efektivitas penerapan sistem Presbiterial Sinodal di tingkat jemaat lokal, khususnya di wilayah pedalaman Papua. Studi berikutnya disarankan untuk fokus pada evaluasi dampak pendidikan eklesiologis dalam memperkuat pemahaman tentang struktur gereja, pengembangan model pelatihan kepemimpinan yang adaptif terhadap dinamika budaya lokal, serta analisis integrasi nilai-nilai dan kearifan lokal dalam proses pengambilan keputusan sinodal. Selain itu, penting pula untuk mengeksplorasi peran teknologi digital dalam meningkatkan partisipasi jemaat dan transparansi pelayanan gereja, khususnya di kawasan terpencil, guna memperkuat efektivitas dan keberlanjutan pelayanan pastoral.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dan memberikan dukungan tak ternilai selama proses penyusunan hingga penyelesaian penelitian ini. Ucapan terima kasih khusus ditujukan kepada Pdt. M. Ngabalin dan Pdt. Z. Sahureka, serta para narasumber dari kalangan pendeta, penatua, dan diaken, yang dengan penuh kesediaan membagikan wawasan serta pengalaman yang sangat berharga. Penulis juga mengapresiasi kontribusi dan dukungan yang diberikan oleh STT GPI Papua serta rekan-rekan akademisi, yang melalui masukan konstruktif dan bantuan mereka, karya ini dapat tersusun dengan baik dan bermakna.

REFERENSI

- A.R. "Wawancara dengan Pdt. GPI Papua, 25 Mei," 2025.
- Admin-Gereja. "Gereja Protestan Indonesia di Papua (GPI PAPUA)." *Kebaktian*. Last modified 2022. <https://kebaktian.com/gereja-protestan-indonesia-di-papua-gpi-papua/>.
- Augustinus, Johanes, Beni Chandra Purba, dan Budi Kelana. "Efektivitas Manajemen Kepemimpinan dalam Gereja." *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan*

- Kristen 1, no. 4 (2023): 27–39. <https://jurnal.tigamutiara.com/index.php/juitak/article/view/188/108>.
- Darmadi, Daud, dan Leonardo Paruntu. “Keseimbangan Otonomi Lokal dan Kesatuan Doktrinal: Kajian Pemerintahan Gereja dalam Konteks Masa Kini.” *Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 6, no. 2 (2024): 122–137. <https://journal-sttaw.ac.id/index.php/kaluteros/article/view/87>.
- Daruhadi, Gagah, dan Pia Sopiati. “Pengumpulan Data Penelitian.” *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–5443. <https://journal-nusantara.id/index.php/J-CEKI/article/view/5181>.
- Felubun, M.J. *Sejarah Gereja Protestan Indonesia di Papua*. Diedit oleh Victor. N Jelira. Edisi 1. Bogor: CV. Desindo Catur Pratama, 2007.
- GPI Papua. *Amandemen Tata Gereja GPI Papua*. Merauke: Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua, 2022.
- Gultom, Joni Manumpak Parulian. “Kepemimpinan Gereja Lokal dalam Pengembangan Kepemimpinan Generasi ‘Z’ Pekerja Migran Kristen Indonesia di Malaysia.” *Jurnal Teruna Bhakti* 5, no. 1 (2022): 89–106. <https://e-journal.stakterunabhakti.ac.id/index.php/teruna/article/view/143>.
- Gultom, Rogate Artaida Tiarasi, Albiner Siagian, Simion Diparuma Harianja, Ibelala Gea, Maria Widiastuti, dan Liyus Waruwu. “Analisis Kepemimpinan dalam Gereja: Studi Perbandingan Kepemimpinan Gereja Protestan dan Gereja Pentakostal.” *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 2 (2023): 955–963. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/1095>.
- Handoko, Yusuf Slamet, dan Alon Mandimpu Nainggolan. “Peran Fungsi Pengorganisasian dalam Peningkatan Kinerja Staf Gereja di GPdI Mahanaim Tegal (Sebuah Kajian Teologis).” *DA AT Jurnal Teologi Kristen* 2, no. 2 (2021): 1–13. https://www.researchgate.net/publication/370988104_PERAN_FUNGSI_PENORGANISASIAN_DALAM_PENINGKATAN_KINERJA_STAF_GEREJA_DI_GPdI_MAHANAIM_TEGAL_Sebuah_Kajian_Teologis.
- Hasugian, Jairus, S. Pantja Djati, dan Eddy Simanjuntak. “Pengaruh Pemahaman Rohaniwan Gereja tentang Model Pemerintahan Gereja terhadap Ketertiban Gereja.” *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 7, no. 1 (2022): 254–267. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/694>.
- Heryanto. “Peran Pemimpin Gereja dalam Kepemimpinan Pelayanan Kaum Muda Masa Kini.” *Harvester: Jurnal Teologi dan Kepemimpinan Kristen* 5, no. 1 (2020): 59–72. <https://e-journal.sttharvestsemarang.ac.id/index.php/harvester/article/view/21>.
- Jonge, Christiaan de. *Apa itu CALVINISME?* Diedit oleh Rika Uli Napitulu dan Simarangkir. Edisi 6. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.
- Junaidah. *Partisipasi Organisasi Keagamaan dalam Penanggulangan Hiv*. Cet. 1. Tangerang Selatan: Pustakapedia, 2021.
- Kaigere, Obeth, Antik Tri Susanti, dan Elly Esra Kudubun. “Peran Komunikasi Rasional dalam Keberhasilan Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Adat Papua.” *JEHSS: Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 5, no. 1 (2022): 403–413. <https://mahesainstitute.web.id/ojs2/index.php/jehss/article/view/1229>.
- L.T. “Wawancara dengan Penatua Jemaat, 26 Mei,” 2025.

- Lolowang, Cassandra Laurensia, Beni Chandra Purba, dan Budi Kelana. “Dinamika Kepemimpinan Pastoral dalam Konteks Manajemen Gereja Modern.” *JUITAK: Jurnal Ilmiah Teologi dan Pendidikan Kristen* 1, no. 4 (2023): 40–53. <https://jurnal.tiga-mutiara.com/index.php/juitak/article/view/190>.
- M.M. “Wawancara dengan Diaken Jemaat, 26 Mei,” 2025.
- Mailoa, Prins Theodor. “Kajian Sosiologi Agama terhadap Fenomena Hierarki Jabatan Fungsional Gerejawi Sistem Presbiterial Sinodal dalam Konteks Gereja Masehi Injili di Halmahera bagian Halmahera Utara.” Universitas Kristen Satya Wacana, 2020.
- Manalu, Maria Magdalena, Betty Arli Sonti Pakpahan, Bernard Lubis, dan Lustani Samosir. “Manajemen Gereja: Upaya Meningkatkan Pelayanan Pastoral melalui Fungsi Manajemen Gereja yang Efektif.” *Immanuel: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 4, no. 1 (2023): 32–45. <https://stt-su.ac.id/e-journal/index.php/immanuel/article/view/175>.
- Ngabalin, Marthinus, Suwanto Adi, dan Tony Tampake. “Pemalangan Tanah Sebagai Bentuk Resistensi Masyarakat Papua Barat terhadap Pembangunan.” *Indonesian Journal of Religion and Society* 6, no. 2 (2024): 66–77. <https://journal.lasigo.org/index.php/IJRS/article/view/423>.
- Piri, Tesalonika Bella, Agnes Relly Poluan, dan Johanna P. Zetlight. “Jabatan Gerejawi dalam Sistem Presbiterial Sinodal di GMIM.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 15–20. <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/2716>.
- Purba, Gabriella Kirana Mutiara, Gunawan Yuli Agung Suprabowo, dan Irene Ludji. “Kajian Etis-Teologis terhadap Peran Pendeta dalam Pengambilan Keputusan di GKJ Salatiga Selatan.” *Fidei: Jurnal Teologi Sistematika dan Praktika* 5, no. 2 (2022): 212–232. <https://www.stt-tawangmangu.ac.id/e-journal/index.php/fidei/article/view/366>.
- R.N. “Wawancara dengan Pegawai Sinode, 26 Mei,” 2025.
- Ratupaira, Arnolis, dan Ayub Sugiharto. “Manajemen Gereja dalam Konsep Governmentality dan Aplikasinya dalam Pelayanan Gereja Lokal.” *Teokristi: Jurnal Teologi Kontekstual dan Pelayanan Kristiani* 4, no. 1 (2024): 65–81. <https://e-journal.sttberitahidup.ac.id/index.php/jtk/article/view/868>.
- Siagian, Hendriko, dan Pardomuan Munthe. “Pengaruh Pengorganisasian Pucuk Pimpinan Gereja terhadap Episkopal Sinodal Gereja HKI.” *In Theos: Jurnal Pendidikan dan Theologi* 1, no. 2 (2021): 65–73.
- Sinaga, Janes, Rudolf Weindra Sagala, Rolyana Ferinia Sibuea, dan Stimson Hutagalung. “Pemahaman Konsep Keterlibatan Anggota Jemaat dalam Pelayanan dan Penginjilan terhadap Pertumbuhan Gereja Berdasarkan Ayat Kisah Para Rasul 2:46-47.” *Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia* 3, no. 1 (2022): 46–47. <https://journal.sttsimpson.ac.id/index.php/JTKI/article/view/450>.
- Siregar, Ersada, dan Yanto Paulus Hermanto. “Sistem Pemerintahan Gereja yang dapat Menjaga Kepemimpinan Alkitabiah.” *Edulead: Journal of Christian Education and Leadership* 4, no. 2 (2023): 117–130. <https://stak-pesat.ac.id/e-journal/index.php/edulead/article/view/167>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: CV. Alfabeta, 2018.
- Sumanto. *Teori dan Aplikasi Metode Penelitian*. Jakarta: Gramedia Pustaka, 2006.

- Tanawany, Richard Reinhard, dan Marthince M. Kokmala. “Pentingnya Manajemen Gereja yang Baik dalam Meningkatkan Pelayanan di Jemaat GKI Efata Mariat Pantai.” *Eirene* 7, no. 1 (2022): 484–501. https://ojs.ukip.ac.id/index.php/eirene_jit/article/view/32.
- Wahyuni, Sri. “Analisis tentang Peran Penatua dalam Pertumbuhan Gereja.” *Kharismata: Jurnal Teologi Pantekosta* 3, no. 1 (2020): 46–59. <https://e-journal.stajember.ac.id/index.php/kharismata/article/view/38>.
- Watofa, Adolina Jaquelina Diana, Roberth Ruland Marini, dan D.S. Budiono Santoso. “Analisis Teologis Implementasi Manajemen dalam Gereja.” *Sesawi: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen* 5, no. 1 (2023): 200–215. <https://e-journal.sttsabdaagung.ac.id/index.php/sesawi/article/view/224>.
- Wibi, Christian, dan Nora Dolisna Simanjuntak. “Gereja Diaspora: Model Gerakan Sinodal bagi Gereja Katolik Indonesia pada Masa Kini.” *In Veritate Lux: Jurnal Ilmu Kateketik Pastoral Teologi, Pendidikan, Antropologi, dan Budaya* 7, no. 1 (2024): 1–17. <https://e-jurnalstpbnaventura.ac.id/index.php/JURKAPS/article/view/88>.
- Wijayanti, Neri, dan Febrian Arif Wicaksana. “Implementasi Fungsi Manajemen George R. Terry dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan.” *Jurnal Cerdik: Jurnal Pendidikan dan Pengajaran* 3, no. 1 (2023): 30–43. <https://jurnalcerdik.ub.ac.id/index.php/jurnalcerdik/article/view/199>.
- Yogatama, Kelvin Imanuela Cristian, Helmi Herawati, dan Pedi Riswandi. “Analisis Akuntabilitas, Efektifitas dan Transparansi Laporan Keuangan Gereja terhadap Pengelolaan Penggunaan Dana Sosial di GBI Sinar Kasih Kabupaten Bengkulu Tengah.” *JASMIEN: Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Ilmu Ekonomi* 4, no. 4 (2024): 178–188. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Jasmien/article/view/597>.